

## BOOK REVIEW

Thomas J. Catlaw, *Fabricating The People: Politics and Administration in The Biopolitical State* (Alabama: The University of Alabama Press, 2007, 258 hal.).

Antonius Galih Prasetyo<sup>1</sup>  
(Jurusan Sosiologi UGM)

Dalam suatu bidang ilmu, teks yang bersifat inovatif atau pelopor dapat mengambil berbagai macam bentuk. Entah apakah itu melalui interpretasi kreatif terhadap teks klasik, sintesis terhadap berbagai pendekatan teoretis atau metodologis, kritik terhadap arus utama pemikiran yang dominan, penawaran “mazhab” atau paradigma baru, pemetaan atas tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi, atau solusi-solusi genial untuk masalah mendesak yang dihadapi “para praktisi”. Dalam administrasi publik, telah banyak bermunculan teks-teks yang mengambil bentuk tersebut, dan tidak jarang sebagiannya menjadi teks klasik yang menjadi bacaan wajib bagi akademisi.

Selain hal-hal di atas, masih ada lagi satu “wajah” teks yang jarang diciptakan, yang mengambil bentuk berupa pembacaan ulang terhadap seluruh sejarah ilmu dalam suatu cara yang mampu meletakkan keseluruhan sejarah tersebut dalam satu kategori yang sama. Mudah untuk dipahami mengapa teks semacam ini jarang diciptakan karena tingkat kesulitannya yang amat tinggi. Tugas itu mensyaratkan seorang penulis untuk memahami seluruh literatur dan pendekatan kunci dalam suatu bidang ilmu secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dalam rangka untuk menunjukkan karakteristik yang dibagi bersama oleh seluruh tendensi, diskursus, dan praktik yang ada di dalam suatu ilmu, pemahaman tersebut juga perlu dipadukan dengan penguasaan lintas disiplin di luar dari bidang ilmu tersebut. Setiap ilmu yang memiliki batas, objek, dan positivitasnya sendiri akan kesulitan untuk melakukan otokritik dan swarefleksivitas sehingga hanya dengan bantuan “tatapan” dari luarlah, seluruh korpus dari suatu ilmu tertentu dapat dinilai dan dibingkai.

Gestur langka itulah yang ditunjukkan dalam buku karya Thomas J. Catlaw yang berjudul *Fabricating the People: Politics and Administration in the Biopolitical State* (2007). Catlaw melakukan interpretasi yang cukup radikal terhadap administrasi publik. Dengan menempatkan administrasi publik sebagai gejala yang menunjuk kepada suatu hal yang selama ini tidak disadari dan dipikirkannya, dia menunjukkan bagaimana administrasi publik sebagai ilmu dan praktik itu mungkin untuk muncul. Sebagai

1. Penulis bekerja sebagai peneliti lepas, alumnus Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada. Penulis bisa dihubungi di email [anigalihprasetyo@gmail.com](mailto:anigalihprasetyo@gmail.com).

\* Thomas J. Catlaw adalah seorang dosen perkuliahan *public affairs* di Arizona State University.

langkah awal, Catlaw mengajukan teka-teki mengenai salah satu problem yang terus menghantui administrasi publik sepanjang sejarahnya, yaitu pertanyaan tentang legitimasi.

Sebagai elemen yang terletak di dalam sistem politik demokratis, administrasi publik membutuhkan justifikasi untuk melegitimasi keberadaannya. Sifat mendesak dari pencarian legitimasi ini terlihat secara gamblang misalnya dalam pertanyaan: *"Jika publik tidak memilih dan mendelegasikan kekuasaannya kepada administrator publik seperti halnya eksekutif dan legislatif, lalu bagaimana cara menuntut mereka bertanggungjawab dan responsif terhadap publik?"*

Di sini, Catlaw memberikan argumen yang menarik. Problem legitimasi tidak dapat diselesaikan atau dijawab dengan pergumulan di dalam medan diskursif internal administrasi publik, karena problem tersebut adalah konsekuensi yang tak terhindarkan akibat komitmen administrasi publik yang kuat terhadap ontologi politik tertentu yang disebut Rakyat (*the People*).

Dengan mendasarkan keberadaan administrasi publik kepada ontologi, pertanyaan yang segera mencuat adalah bagaimana ontologi—penyelidikan yang mendalam mengenai hakikat dari realitas atau ada (*being*)—berkorelasi dengan administrasi publik? Menurut Catlaw, hubungan di antara keduanya bersifat niscaya karena administrasi publik adalah teknologi yang secara rutin mereproduksi ontologi yang disebut Rakyat. Melalui praktik-praktik yang dilakukannya, administrasi publik yang berkaitan erat dengan *governing* atau tindakan pengelolaan adalah jawaban tersirat terhadap pertanyaan ontologis "Apa artinya menjadi?" (*what does it mean to be?*) (hal. 4). Komitmen ontologis itulah yang pada akhirnya juga membuat problem klasik lain dalam administrasi publik, yaitu dikotomi antara politik dan administrasi, menjadi suatu hal yang permanen, betapa pun kerasnya dia diingkari.

Untuk menopang klaim yang diajukannya, Catlaw melakukan survei terhadap 14 teks kunci yang merepresentasikan berbagai macam "aliran" dalam administrasi publik, merentang dari yang paling ortodoks seperti Frank Goodnow sampai yang paling kritis seperti O.C. McSwite (lihat Bab 2). Melaluinya, ditunjukkan bahwa meskipun masing-masing memiliki perbedaan dalam posisi teoretis dan tawaran solusi yang diberikan untuk memecahkan problem legitimasi, semua teks tersebut memiliki satu persamaan, yang dalam istilah Catlaw, "berada di bawah mistar sang Rakyat" (hal. 17). Hal ini mengindikasikan, seluruh diskursus administrasi publik sepanjang sejarahnya dapat berlangsung dan dimungkinkan hanya karena selalu bertumpu pada suatu agen yang disebut dengan Rakyat. Rakyat adalah sumber kedaulatan politik. Untuk mendapatkan legitimasi bagi keberadaannya, administrasi publik menjadikan dirinya sebagai representasi dari Rakyat, dan karenanya dipercaya sebagai instansi yang bertindak sesuai dengan kehendak Rakyat.

Ontologi Rakyat tersebut menjadi asal dari seluruh problem dan kesulitan yang dihadapi oleh administrasi publik. Rakyat menjadi sumber masalah karena dia terstruktur sebagai representasi, dan sebagai representasi, dia selalu menciptakan eksklusivitas bagi sebagian individu. Untuk memahami hal ini, perlu dijelaskan di sini bahwa representasi bekerja melalui hubungan yang tetap di antara model dengan salinan. Salinan adalah manifestasi dari model, dan dia berhubungan dengan salinan yang lain atas dasar relasi mereka dengan model. Dalam tata relasi ini, model menempati peran konstitutif karena dia berhak untuk mengorganisir, mengkatalogkan, mendeskripsikan, dan terutama menilai salinan-salinan yang ada, yakni apakah mereka telah menjadi salinan yang cermat dan akurat dari model. Melalui logika ini, eksklusivitas muncul ketika apa yang ditentukan sebagai model diputuskan. Keputusan tersebut bersifat arbitrer karena model, yakni kategori Rakyat, sesungguhnya merupakan kategori kosong yang tidak memuat apa pun. Namun, untuk menutupi kekosongan tersebut, model diberi muatan positif dengan cara mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang natural dan objektif.

Salinan-salinan yang ada—yakni individu-individu yang ada dalam kehidupan sosial—kemudian dinilai apakah layak untuk dimasukkan ke dalam kategori Rakyat. Dalam operasi ini, akan selalu ada yang tereksklusikan karena untuk menegaskan identitasnya, Rakyat tidak dapat mencakup semuanya sehingga harus menyisakan sebagian elemen di luar dirinya. Eksklusivitas ini dibenarkan dengan alasan bahwa pihak-pihak yang tereksklusikan tidak memiliki predikat yang dibutuhkan untuk dapat disebut sebagai bagian dari Rakyat, entah apakah itu rasionalitas, peradaban, kesehatan, normalitas, ras, gender, dan lain-lain.

Rakyat, dengan demikian, tidak lain dari suatu objek buatan yang *diproduksi*. Cara-cara di mana produksi Rakyat tersebut digelar dalam kehidupan sosial disebut sebagai proyek biopolitik. Dengan mengarahkan analisisnya pada konteks Amerika Serikat, Catlaw melacak bagaimana proyek biopolitik ini dijalankan secara historis. Pada mulanya, Rakyat diproduksi melalui konstitusi. Sedangkan, konstitusi mengeksklusikan sebagian individu dengan dua langkah. *Pertama*, mendefinisikan Rakyat dalam kerangka legal sebagai warganegara. *Kedua*, di dalam kategori warga negara tersebut, konstitusi melakukan eksklusivitas lebih lanjut dengan menilai derajat kewarganegaraan seseorang, yakni sejauh mana mereka memiliki atribut-atribut yang diidealkan konstitusi (hal. 101).

Konstitusi perlu dilengkapi dengan hukum sebagai aturan lebih rendah yang mengatur urusan publik yang lebih teknis. Hal ini karena sebagai teknik biopolitik, eksklusivitas yang dilakukan melalui konstitusi terasa terlalu mencolok sehingga berpotensi untuk ditentang. Untuk itu, “struktur fantasional” dari konstitusi (hal. 96-99) mensyaratkan dilakukannya materialisasi atau objektivasi dari individu-individu yang

tereksklusi ke dalam ranah kehidupan yang disebut dengan kondisi alamiah (*state of nature*). Kondisi alamiah ini merupakan istilah klasik dalam teori politik yang merujuk kepada kondisi pra-politik, sebuah kondisi yang eksternal dari keberadaan masyarakat politik dalam naungan konstitusi sehingga karenanya mereka yang berada dalam kondisi ini perlu diatur dan “dididik” oleh aparatus hukum agar mereka dapat segera “menjadi” masyarakat politik.

Pada awal abad ke-20, efektivitas konstitusi dan hukum untuk mengonstruksi Rakyat yang koheren, satu, dan harmonis mulai luntur. Kegagalan hukum tersebut kemudian membuka jalan bagi hadirnya rezim administrasi. Ini merupakan tatanan biopolitik baru yang berperan sebagai suplemen atas konstitusi dan hukum. Rezim administrasi muncul seiring dengan dimulainya Era Progresif pada awal abad ke-20 di Amerika, yang sekaligus menandai lahirnya administrasi publik di negeri tersebut. Apa yang khas dari momen biopolitik baru ini adalah bahwa dalam upayanya untuk menciptakan imajinasi bernama Rakyat, administrasi menerapkan apa yang disebut dengan “internalisasi eksklusi”. Melaluinya, individu-individu yang dulu dalam rezim hukum ditempatkan di luar kategori Rakyat kini dimasukkan sebagai bagian dari Rakyat. Namun, ini bukan berarti bahwa eksklusi berhenti dilakukan. Eksklusi dalam rezim administrasi kini dilakukan dengan mekanisme penilaian yang menghakimi para “anggota baru” Rakyat tersebut sebagai anggota yang belum terintegrasi secara penuh dengan “anggota lama”.

Catlaw meletakkan administrasi publik dalam konteks sosial yang lebih luas, dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat disiplin. Masyarakat ini ditandai oleh persebaran situs-situs disiplin yang mengawasi, merawat, dan mendisiplinkan tubuh-tubuh manusia yang ada di dalamnya. Pendisiplinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tubuh-tubuh tersebut mampu memerankan dirinya sebagai tubuh Rakyat yang ideal, yang ditandai oleh netralitas, kompetensi, dan peradaban. Selain teknik disiplin tersebut, masyarakat disiplin juga memuat modalitas lain yang disebut dengan *biopower*. Untuk menjamin produksi Rakyat secara mantap, antara disiplin dan *biopower* harus terdapat resonansi yang kuat. Apabila disiplin dilangsungkan dalam lingkungan yang terbatas, *biopower* berlangsung dalam tataran makro pada aras populasi. Inilah ranah yang menjadi *terra firma* dari administrasi publik. Catlaw memahami administrasi publik sebagai agen disipliner yang beroperasi di antara situs-situs disipliner yang telah ada di masyarakat (hal. 153). Dengan kata lain, administrasi publik mempunyai fungsi untuk mendisiplinkan individu-individu yang berada di luar atau tidak bisa didisiplinkan oleh situs-situs disipliner “privat” seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik. Untuk menjustifikasi tindakan disipliner yang dilakukannya, para administrator publik mengklaim dirinya sebagai pihak netral yang

mempunyai pamrih profesional untuk mengarahkan individu ke dalam kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam Bab 6, Catlaw menyatakan bahwa kini kita, atau setidaknya masyarakat Amerika, telah memasuki tatanan biopolitik baru yang disebut dengan masyarakat kontrol. Masyarakat ini mulai muncul sejak tahun 1970-an seiring dengan mulai rontoknya kapasitas rezim administrasi dengan teknik disiplinnya dalam menciptakan ontologi Rakyat. Dengan hancurnya kepercayaan kepada Rakyat, kehidupan sosial mengalami kekacauan dan disintegrasi karena tidak ada lagi agen yang menjadi sumber dari otoritas politik. Pada titik ini, administrasi publik telah mati (hal. 191). Masyarakat kontrol ditandai dengan semakin ratanya kehidupan sosial, di mana batas-batas yang selama ini berlaku (pasar dan pemerintah, dalam dan luar, publik dan privat) tidak lagi berlaku. Bersamaan dengan itu, muncul fenomena peningkatan resiko secara besar-besaran. Setiap individu dipaksa untuk memilih segala hal dalam hidupnya tanpa panduan legal dan moral apa pun. Peningkatan resiko ini kemudian menyebabkan munculnya tindakan pengamanan dalam kadar yang berlebihan, Pengamanan ini dilakukan dengan cara membatasi akses dan mobilitas individu. Setiap individu diabstraksikan ke dalam sehimpunan vektor tertentu seperti kewarganegaraan, etnisitas, agama, ras, riwayat penyakit, tingkat pendapatan, dan kelayakan. Semakin besar resiko yang ada di dalam diri seseorang, semakin dibatasi aksesnya untuk bergerak.

Dalam masyarakat kontrol, pemerintah justru menjadi materialisasi dari eksklusi. Artinya, kini dia dianggap sebagai yang lain (*the Other*) yang meracuni tumbuhnya sosialitas. Klaim otoritatif pemerintah dengan mengatasnamakan Rakyat kini tidak lagi dianggap karena Rakyat sebagai objek dari operasi representasi kini telah hilang. Hilangnya otoritas pemerintah ini membawa dua konsekuensi penting. *Pertama*, berkembangnya sikap antipemerintah yang dibarengi dengan euforia neoliberalisme dan *new public management*, dengan fungsi-fungsi tradisional pemerintah diserahkan kepada swasta. *Kedua*, pemerintah membatasi gerakannya ke dalam fungsi minimal, yakni menjaga keamanan seiring dengan resiko yang semakin meluas di masyarakat. Paradoksnya, minimalisasi peran pemerintah ini membawa pada saat bersamaan ekspansi peran pemerintah. Mengapa? Karena berbeda dengan rezim administrasi yang mematerialisasikan pihak tereksklusi ke dalam lapangan sosial sehingga sasaran kontrol dapat diidentifikasi dengan jelas, pada masyarakat kontrol materialisasi tersebut tidak lagi dilakukan. Kini semua orang rentan untuk menjadi objek dari intervensi dan kontrol. Tidak ada tempat dan subjek yang lolos dari pengawasan karena seolah-olah semuanya dilemparkan ke dalam keadaan alamiah tanpa perlindungan hukum dan hak-hak politik. Dengan kata lain, semua orang menjadi rentan untuk diesklusi. Dengan meminjam istilah Giorgio Agamben, Catlaw menyebut bahwa semua individu dalam

masyarakat kontrol berada di dalam “kamp”, tempat di mana segalanya bisa terjadi. Regulasi sosial diciptakan dan dikelola justru melalui kekacauan dan disintegrasi. Catlaw mengajukan contoh perang global melawan teror (*global war on terror*) yang dikomandoi Amerika sebagai ilustrasi untuk fenomena tersebut.

Melalui seluruh uraian yang disampaikan, Catlaw sesungguhnya hanya mau menunjukkan satu hal, yaitu bahwa komitmen administrasi publik terhadap ontologi representasi bernama Rakyat tidak dapat lagi dipertahankan. Untuk itu, dalam bab terakhir (Bab 7), Catlaw mengajukan sebuah ontologi politik baru yang disebut dengan “politik subyek.” Politik subyek adalah relasi biopolitik pasca-representasi yang menyibukkan dirinya dengan proses di mana “kebenaran, objektivitas, dan subjektivitas secara kontekstual diproduksi, ditentukan, dan ditopang” (hal. 189) dalam suatu usaha penciptaan “ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan antar subjektivitas manusia sambil mengakui sifat tak-dapat-dihitung (*incalculable*) dari subjektivitas sebagai syarat dari penciptaan dunia” (hal. 192).

Ontologi politik tersebut bertolak dari enam proposisi: 1) afirmasi terhadap adanya hubungan antara kehidupan politik (*bios*) dengan kehidupan alamiah (*zoë*) tanpa adanya imposisi dari satu bentuk kehidupan ke bentuk yang lain; 2) mengakui adanya perbedaan radikal yang tak terbandingkan dalam diri setiap subjek; 3) fokus terhadap situasi unik yang ada dalam setiap situasi; 4) memahami *governing* sebagai tindakan yang dijalankan dalam segenap pengalaman manusia; 5) semua orang adalah praktisi atau administrator publik; dan 6) tanpa mengejar suatu tujuan tertentu untuk dicapai, praktik *governing* secara simultan harus melakukan tindakan yang baik bagi subjek yang rentan (hal. 193-198).

Dalam kerangka politik subyek ini, administrasi publik, yang kata Catlaw telah mati, dapat bangkit dan mengambil peranan. Namun untuk itu, pemahaman atas administrasi publik perlu diperluas secara ekspansif sebagai hal ihwal yang terkait dengan pengelolaan atau pentadbiran (*governing*) dan sebagai aktivitas manusia secara umum. *Governing* adalah *conduct of conduct*, yakni produksi mekanisme yang mengonstitusi dan menopang subjektivitas dan relasi antara subjek dan objek, yang berlangsung di dalam konteks atau tempat tertentu. Administrasi publik, dalam pengertian ini, adalah praktik-praktik umum dalam menciptakan dan mempertahankan dunia manusia (hal. 191).

Terdapat dua tanggapan terhadap karya Catlaw ini. Tanggapan pertama berkaitan dengan arsitektur pemikiran yang dibangun Catlaw. Sebagai karya teoretis murni, Catlaw menyusun keseluruhan argumen yang dibangunnya dengan melakukan dialog yang ekstensif di antara berbagai gagasan dan konsep. Diskusi yang panjang dan

berliku terhadap satu tema dijalankan di atas teori tertentu yang dijadikan sebagai titik berangkat pembahasan. Akan tetapi, teori yang dijadikan landasan tersebut difungsikan sebagai suatu aksioma sehingga tidak diproblematikasi sama sekali. Dengan cara ini, Catlaw secara ironis justru melakukan apa yang dikritiknya, yakni melakukan eksklusi terhadap suara-suara alternatif. Ketika dia berbicara bahwa seluruh problem administrasi publik berakar kepada komitmennya terhadap ontologi Rakyat yang terstruktur sebagai keputusan sepihak yang mengecualikan dan tanpa panduan, Catlaw sesungguhnya juga melakukan hal yang sama dalam teksnya. Keseluruhan argumen yang ditulis dalam setiap bab yang memuat satu tema atau argumen pokok tertentu hanya mungkin untuk dijalankan karena setiap bab mengasumsikan adanya satu atau dua teori besar (*grand theory*) yang berfungsi untuk melegitimasi keseluruhan argumen di dalamnya. Teori besar tersebut dipilih Catlaw secara sepihak, bukannya hasil dari pertimbangan matang yang lahir dari diskusi dengan teoretikus lain yang membahas tema serupa. Bab 3 tentang representasi misalnya, dibangun di atas aksioma teori Deleuze tentang relasi antara model dengan salinan tanpa didahului dengan diskusi dengan teoretikus lain yang membahas tema serupa, Hanna Pitkin contohnya, sehingga dari diskusi tersebut Catlaw dapat memberikan penjelasan yang solid mengapa dirinya memilih teori tertentu tentang representasi dan bukan teori lainnya.

Tanggapan yang kedua berkaitan dengan signifikansi dari *Fabricating the People* bagi diskursus yang terjadi di negeri ini, baik dalam tataran sosial-politik secara umum maupun administrasi publik secara khusus. Memang, di dalam bukunya Catlaw membatasi "konfirmasi" terhadap gagasan yang dielaborasikannya pada apa yang terjadi di Amerika Serikat, dan untuk itu dia siap untuk dituduh sebagai orang yang bersikap parokial (hal. 90). Namun demikian, pengamatan cermat akan dapat menunjukkan bahwa sesungguhnya karya ini beresonansi dengan apa yang terjadi Indonesia. Menariknya, jika Catlaw menjelaskan tiga momen biopolitik atau tiga "modus produksi" Rakyat (konstitusi/hukum, administrasi/masyarakat disiplin, dan masyarakat kontrol) sebagai tiga sekuen historis yang berlangsung secara linier di sepanjang sejarah Amerika, kita dapat melihat manifestasi dari tiga rezim tersebut secara simultan di Indonesia dalam berbagai intensitas dan level. Di negeri ini, Rakyat sebagai substansi ontologis begitu sering dirujuk oleh para politisi dan elit masyarakat tanpa adanya kejelasan mengenai siapa yang secara spesifik dimaksud dengan Rakyat.

Manifestasi konstitusi sebagai teknologi (re)produksi Rakyat terlihat dalam fakta bahwa di balik pretensi universal dan alamiahnya, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara adalah bagian yang sah dari Rakyat, nyatanya terdapat eksklusi terselubung di dalam kategori warganegara tersebut, misalnya terhadap mereka yang menganut agama di luar agama resmi, penghayat aliran kepercayaan, dan anak yang lahir

di luar nikah. Ada pun rezim biopolitik administrasi juga mewujud secara jelas di Indonesia. Seiring dengan semakin modern dan kompleksnya struktur masyarakat, kehidupan warganegara terutama di perkotaan besar semakin dikepong oleh proliferasi lingkungan disipliner dalam berbagai bentuk (rumah sakit, universitas, *real estate*, dan lain-lain) yang masing-masing mendiktekan aturan main dan kriteria normalitas sendiri-sendiri. Demikian pula halnya dengan apa yang disebut sebagai masyarakat kontrol. Masyarakat Indonesia semakin memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan utama yang mencirikan masyarakat kontrol seperti pengaturan yang ketat untuk mengakses tempat-tempat tertentu, rasa kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi akibat kriminalisasi yang dilatari oleh absennya negara dan lemahnya penegakan hukum, maraknya konflik baik vertikal maupun horizontal, dan menguatnya kemauan pemerintah untuk melakukan sekuritisasi sosial sebagaimana yang dapat dilihat dalam berbagai peraturan dan rancangan peraturan seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, dan RUU Wajib Militer.

Kuatnya relevansi tersebut merupakan salah satu alasan mengapa karya ini patut dibaca. Selain itu, kritik dan tawaran yang diberikannya memberikan sumbangan yang penting bagi teori administrasi publik. Sebagai *by product* dari disertasi seseorang yang mengambil *major* pada kajian administrasi publik dan *minor* pada kajian teori sosial-politik kontemporer, memang karya Catlaw ini adalah karya yang tak biasa. Di dalamnya, para teoretikus administrasi publik yang telah dikenal luas seperti Dwight Waldo, Emmette Redford, George Frederickson, R.B. Denhardt, dan Laurence Lynn didialogkan dengan cara yang tak terduga dengan para teoretikus sosial-politik kontemporer seperti Carl Schmitt, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Claude Lefort, Alain Badiou, Giorgio Agamben, Michael Hardt, Antonio Negri, dan Slavoj Žižek. Akademisi administrasi publik yang tak akrab dengan nama-nama tersebut akan membutuhkan perjuangan ekstra untuk dapat memahami apa yang disampaikan Catlaw dengan jernih. Namun, buah dari perjuangan tersebut tak akan sia-sia karena karya Catlaw terbukti menawarkan horizon baru dalam memandang administrasi publik. Melalui pembacaannya yang subtil dan peka atas sejarah intelektual administrasi publik, Catlaw telah menyibak ranah-ranah diskursif baru yang terbuka untuk diesplorasi lebih lanjut. Untuk itu, sebagai cara yang layak untuk menghormatinya, dia perlu dirayakan dengan cara menanggapi secara serius.